AKTA PEMISAHAN

Nomor:

-Pada hari ini,

-Pukul

-Menghadap kepada saya, ASHOYA RATAM, Sarjana Hukum, Magister -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri para -
saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

I. i.
ii.

-menurut keterangan mereka dalam hal ini masing-masing bertindak dalam jabatannya tersebut, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas “**PT BANK CIMB NIAGA Tbk**”, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Graha CIMB Niaga, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta, 12190, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang didirikan berdasarkan akta tertanggal 26-9-1955 (dua puluh enam September seribu sembilan ratus lima puluh lima) nomor 90, yang minuta aktanya dibuat dihadapan Raden Meester SOEWANDI, dahulu Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan tertanggal -----

1-12-1955 (satu Desember seribu sembilan ratus lima puluh lima) nomor J.A.5/110/15 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 4-9-1956 (empat September seribu sembilan ratus lima puluh enam) nomor 71, Tambahan nomor 729/1956, yang Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “**UUPT**”) sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-10-2008 (tujuh belas Oktober dua ribu delapan) nomor 84, Tambahan nomor 20154/2008, yang Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut telah diubah kembali sebagaimana diumumkan/dimuat dalam: --

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 3-3-2009 (tiga Maret dua ribu sembilan) nomor 18, Tambahan nomor 159/2009; -----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-3-2009 (sepuluh -- Maret dua ribu sembilan) nomor 20, Tambahan nomor 7162/2009;
- akta tanggal 2-7-2008 (dua Juli dua ribu delapan) nomor 6, dan ---- pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima - dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 7-7-2008 (tujuh Juli dua ribu - delapan) nomor AHU-AH.01.10-17196; -----
- akta tanggal 23-7-2008 (dua puluh tiga Juli dua ribu delapan) ----- nomor 42, dan pemberitahuan atas penggabungan Perseroan telah - diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia tertanggal 22-10-2008 (dua puluh dua ----- Oktober dua ribu delapan) nomor AHU-AH.01.10-22669; -----
- akta tanggal 21-11-2008 (dua puluh satu November dua ribu ----- delapan) nomor 10, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -- Dasarnya telah terima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak ---

Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal -----
9-12-2008 (sembilan Desember dua ribu delapan) nomor -----
AHU-AH.01.10-24908; -----

- akta tanggal 28-5-2009 (dua puluh delapan Mei dua ribu sembilan) nomor 30, dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 13-7-2009 (tiga belas Juli dua ribu sembilan) nomor AHU-AH.01.10-10088; -
- akta tanggal 22-12-2010 (dua puluh dua Desember dua ribu ----- sepuluh) nomor 36 dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran -- Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan ----- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal - 6-1-2011 (enam Januari dua ribu sebelas) nomor ----- AHU-AH.01.10-00552; -----
- akta tanggal 1-3-2011 (satu Maret dua ribu sebelas) nomor 1 dan -- pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima - dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 15-3-2011 (lima belas Maret - dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-07889; -----

keenam minuta akta yang disebutkan terakhir dibuat dihadapan -----
Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex -----
Legibus Magister, dahulu Notaris di Jakarta, yang protokolnya telah --
diserahkan kepada saya, Notaris;-----

- akta tanggal 21-4-2014 (dua puluh satu April dua ribu empat belas) nomor 22, yang minutanya dibuat dihadapan HIMAWAN ----- SUTANTO, Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti dari saya, -- Notaris dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----- Keputusannya tertanggal 30-4-2014 (tiga puluh April dua ribu ---- empat belas) nomor AHU-02085.40.20.2014 serta pemberitahuan - atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal 30-4-2014 (tiga puluh April dua ribu empat ---- belas) nomor AHU-01544.40.21.2014;-----

Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali dalam ---
rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (untuk -
selanjutnya disebut “**POJK**”) nomor 32/POJK.04/2014 tentang -----
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -----
Perusahaan Terbuka dan POJK nomor 33/POJK.04/2014 tentang -----
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, -----
sebagaimana telah dimuat dalam akta tanggal 6-5-2015 (enam Mei ----
dua ribu lima belas) nomor 10 dan pemberitahuan atas perubahan ----
Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tertanggal
18-5-2015 (delapan belas Mei dua ribu lima belas) nomor AHU-
AH.01.03-0932580;

Kemudian Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali
sebagaimana diumumkan/dimuat dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 24-7-2018 (dua puluh empat Juli dua ribu delapan belas) nomor 59, Tambahan nomor --- 1749/L/2018;- -----
- Akta tanggal 18-9-2017 (delapan belas September dua ribu tujuh --- belas) nomor 40, yang minuta aktanya dibuat di hadapan saya, ---- Notaris dan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya ---- telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

- Manusia Republik Indonesia sesuai suratnya tanggal 3-10-2017 ----
 (tiga Oktober dua ribu tujuh belas) nomor -----
 AHU-AH.01.03-0177066;-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-10-2020 (dua -----
 puluh tiga Oktober dua ribu dua puluh) nomor 85, Tambahan -----
 nomor 40657/2020; -----
- Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali dalam ---
 rangka penyesuaian POJK nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana -
 dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan ----
 Terbuka dan POJK nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan ----
 Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara -----
 Elektronik sebagaimana telah diumumkan dalam Berita Negara -----
 Republik Indonesia tertanggal 21-5-2021 (dua puluh lima Mei dua ---
 ribu dua puluh satu) nomor 41, Tambahan nomor 17835/2021; -----
 kemudian Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kembali diubah
 sebagaimana dimuat/diumumkan dalam:-----
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 14-6-2022 (empat ----
 belas Juni dua ribu dua puluh dua) nomor 47, Tambahan nomor ----
 19393/2022; -----
 - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 2-4-2024 (dua April --
 dua ribu dua puluh dua) nomor 27, Tambahan nomor 10489/2024;-
 - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-1-2025 (sepuluh
 Januari dua ribu dua puluh lima) nomor 3, Tambahan nomor 686/2025;
- Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut diubah kembali dalam
 rangka penyesuaian POJK nomor 17 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh
 tiga) tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, berdasarkan akta
 tertanggal 3-4-2024 (tiga April dua ribu dua puluh empat) nomor 15
 dimana pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah
 diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Republik Indonesia sesuai suratnya nomor AHU-AH.01.03-0085998
 tertanggal 8-4-2024 (delapan April dua ribu dua puluh empat);
- dan terakhir diubah kembali dalam rangka penyesuaian POJK nomor
 2 Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) tentang Tata Kelola Syariah
 Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, berdasarkan akta
 tertanggal 25-10-2024 (dua puluh lima Oktober dua ribu dua puluh
 empat) nomor 54 yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris,
 dimana pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah
 diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Republik Indonesia sesuai suratnya nomor AHU-AH.01.03-0209390
 tertanggal 8-11-2024 (delapan Nopember dua ribu dua puluh empat);
 sedangkan susunan terakhir anggota Direksi perseroan terbatas tersebut
 termuat dalam akta tanggal 3-3-2025 (tiga Maret dua ribu dua puluh lima)
 nomor 1, yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris.
 (untuk selanjutnya “**PT BANK CIMB NIAGA Tbk**” tersebut akan
 disebut:
- a. “**Perseroan**” dalam kedudukannya sebagai pihak yang akan melakukan
 Pemisahan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini);-----
 - b. “**Calon Pendiri BUS**”.

- II.
 - i.
 - ii.

-menurut mereka dalam hal ini masing-masing bertindak dalam jabatannya
 tersebut, demikian mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak untuk dan
 atas nama serta sah mewakili perseroan terbatas “**PT COMMERCE
 KAPITAL**” berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Gedung Bursa

Efek Indonesia, Tower 2 Lantai 20, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12190; didirikan berdasarkan akta tertanggal 11-11-2005 (sebelas November dua ribu lima) nomor 15, yang minutanya dibuat dihadapan AULIA TAUFANI Sarjana Hukum, pada waktu itu pengganti SUTJIPTO Sarjana Hukum, dahulu Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 29-12-2005 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima) nomor C-34805 HT.01.01.TH.2005;-----

-Anggaran Dasarnya telah diubah secara keseluruhan dalam rangka ---
-penyesuaian dengan UUPT sebagaimana termuat dalam akta tanggal -
15-1-2009 (lima belas Januari dua ribu sembilan) nomor 3, yang -----
minutanya dibuat dihadapan YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, pada waktu itu Notaris di ----
Kabupaten Bekasi, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri --
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat -----
Keputusan tertanggal 24-3-2009 (dua puluh empat Maret dua ribu ----
sembilan) nomor AHU-09178.AH.01.02.Tahun 2009;-----
Anggaran Dasar perseroan terbatas tersebut kemudian diubah kembali
sebagaimana termuat dalam :

- akta tanggal 3-12-2009 (tiga Desember dua ribu sembilan) nomor -
04, yang minutanya dibuat dihadapan BUCHARI HANAFI, -----
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang, yang pemberitahuan --
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
surat tertanggal 18-1-2010 (delapan belas Januari dua ribu sepuluh)
nomor AHU-AH.01.10-01238;
- akta tanggal 16-4-2010 (enam belas April dua ribu sepuluh) -----
nomor 180, yang minutanya dibuat dihadapan Notaris Pengganti ---
AULIA TAUFANI Sarjana Hukum tersebut dan telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tertanggal 6-7-2010 (enam Juli dua ---
ribu sepuluh) nomor AHU-33924.AH.01.02.Tahun 2010; dan ----
pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima --
-dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia sesuai suratnya tertanggal 29-7-2010 (dua puluh -----
sembilan Juli dua ribu sepuluh) nomor AHU-AH.01.10-19236; ----
- akta tanggal 8-7-2011 (delapan Juli dua ribu sebelas) nomor 3, ----
yang minutanya dibuat dihadapan YAYUK SRI -----
WAHYUNINGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur dan telah memperoleh -
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tertanggal 3-8-2011 (tiga Agustus dua ribu sebelas) ----
nomor AHU-39190.AH.01.02.Tahun 2011;-----
- akta tanggal 21-10-2020 (dua puluh satu Oktober dua ribu dua puluh)
nomor 7, yang minutanya dibuat dihadapan YAYUK SRI -----
WAHYUNINGSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur, yang pemberitahuan
atas perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai
suratnya tertanggal 02-11-2020 (dua November dua ribu dua puluh)
nomor AHU-AH.01.03-0402995;-----

-susunan terakhir anggota Dewan Komisaris dan Direksi perseroan -----
terbatas tersebut dimuat dalam akta tanggal 24-3-2022 (dua puluh empat---
Maret dua ribu dua puluh dua) nomor 9, yang minutanya dibuat
dihadapan Notaris YAYUK SRI WAHYUNINGSIH, Sarjana Hukum,
Magister Kenotariatan;.....

(untuk selanjutnya “PT COMMERCE KAPITAL” tersebut akan disebut dengan “Calon Pendiri BUS”).....

(Calon Pendiri BUS secara bersama-sama akan disebut dengan “Para Calon Pendiri BUS”)

- Penghadap saya, Notaris kenal.
- Penghadap masing-masing bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan terlebih dahulu hal sebagai berikut: -----
- A. Bahwa Perseroan bermaksud untuk melakukan Pemisahan terhadap UUS (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang dimiliki Perseroan dengan cara mendirikan bank umum syariah sebagai bank hasil Pemisahan sesuai dengan ketentuan POJK No. 12/2023 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini);
- B. Bahwa Direksi Perseroan telah menyusun Rancangan Pemisahan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang dimaksud dalam POJK No. 12/2023 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), yang selanjutnya telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam [*], dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, serta telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini;
- C. Guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- i. UUPT;
 - ii. POJK No. 12/2023;
- Perseroan telah melakukan tindakan sebagai berikut:-----
- a. Pada tanggal [*], Direksi Perseroan telah mengumumkan ringkasan Rancangan Pemisahan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu [*]. -----
 - b. Pada tanggal [*], Direksi Perseroan telah mengumumkan secara resmi tentang rencana Pemisahan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) kepada karyawan Perseroan melalui [*];-----
 - c. Pada tanggal [*], Direksi Perseroan telah mengajukan permohonan persetujuan prinsip pendirian bank umum syariah hasil Pemisahan sesuai dengan Pasal 69 POJK No. 12/2023 termasuk di dalamnya melampirkan Rancangan Pemisahan kepada OJK (sebagaimana didefinisikan dibawah ini) melalui surat Perseroan tertanggal [*] nomor [*];
- yang masing-masing fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini.-----
- D. Bahwa sampai batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman ringkasan Rancangan Pemisahan, tidak terdapat keberatan yang diajukan atas rencana Pemisahan oleh para kreditor Perseroan (sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (5) UUPT), sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal [*] dan [*], yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini.-----
-
- E. Bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya disebut dengan “RUPS”) yang dilaksanakan pada tanggal [*] Perseroan telah menyetujui Pemisahan termasuk menyetujui Rancangan Pemisahan, konsep Akta Pemisahan dan konsep akta pendirian BUS hasil Pemisahan sebagaimana tertuang dalam Risalah RUPS PT BANK CIMB NIAGA Tbk tertanggal [*] nomor [*] yang minutanya dibuat oleh saya, Notaris. -----
- F. Bahwa atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dijelaskan di premis huruf C di atas, OJK telah menyampaikan persetujuannya sebagaimana dimuat dalam Surat OJK tertanggal [*] nomor [*];

- G. Bahwa Para Calon Pendiri BUS telah menyetujui:-----
- i. Pemisahan UUS Perseroan yang mengakibatkan seluruh Aktiva dan Pasiva UUS Perseroan akan beralih secara hukum kepada BUS pada Tanggal Efektif Pemisahan;-----
 - ii. Rancangan Pemisahan.-----
- H. Bahwa untuk melaksanakan Pemisahan, perlu dibuat suatu Akta Pemisahan dimana Rancangan Pemisahan digunakan sebagai dasar penyusunan Akta Pemisahan, hal mana hendak dinyatakan Para Pihak dengan akta ini dan turut ditandatangani Para Calon Pendiri sebagai bentuk persetujuannya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Perseroan dan Para Calon Pendiri BUS telah setuju dan sepakat untuk melangsungkan dan melaksanakan Pemisahan tersebut berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut: -----

----- **Pasal 1** -----

DEFINISI -----

Kecuali sebaliknya ditentukan atau ditegaskan dalam Akta Pemisahan ini, kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut: -----

1. “**Akta Pemisahan**” adalah akta yang dibuat Perseroan dan Para Calon Pendiri BUS untuk melaksanakan Pemisahan dengan syarat dan ketentuan yang diatur didalamnya, termasuk lampiran akta ini berikut perubahan dan/atau penambahan yang dibuat terhadapnya.-----
2. “**Aktiva dan Pasiva UUS Perseroan**” adalah seluruh kekayaan/aktiva dan hutang/pasiva UUS (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang dimiliki secara sah atau dikuasai oleh atau menjadi tanggungan dan beban Perseroan yang berdasarkan Pemisahan pada Tanggal Efektif Pemisahan akan beralih karena hukum kepada BUS (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), termasuk tetapi tidak terbatas pada: -----

- a. barang aktiva atau kekayaan berupa apapun, baik berupa barang -----
berwujud maupun tidak berwujud; -----
- b. hutang dan kewajiban.-----

Rincian dari Aktiva dan Pasiva UUS Perseroan akan diuraikan lebih lanjut pada Laporan Keuangan BUS yang merupakan satu kesatuan dengan akta ini. ;-----

3. **"Bank Umum Syariah"** atau **"BUS"** adalah bank umum syariah yang akan didirikan oleh Para Calon Pendiri BUS yang akan diberi nama PT BANK CIMB NIAGA SYARIAH yang merupakan bank umum syariah hasil Pemisahan dari UUS Perseroan;-----
4. **"Hari Kerja"** adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.-----
5. **"Laporan Keuangan BUS"** adalah laporan keuangan BUS yang mencakup laporan posisi keuangan dan rekening administratif BUS pada Tanggal Efektif Pemisahan.-----
6. **"OJK"** adalah Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam -- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah sebagian terakhir melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (untuk selanjutnya disebut dengan **"UU OJK"**), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa -----
keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, - lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya-----
7. **"Pemisahan"** adalah tindakan hukum pemisahan tidak murni yang diatur oleh Pasal 1 butir 12 *juncto* Pasal 135 ayat (3) dari UUPT dan POJK Nomor 12/2023 yang dilaksanakan terhadap UUS Perseroan dengan mendirikan BUS sebagai bank umum syariah hasil Pemisahan.-----
8. **"POJK No. 12/2023"** adalah Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Unit Usaha Syariah, sebagaimana telah dicabut sebagian melalui Peraturan OJK Nomor 2 Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.-----
9. **"POJK No. 31/2015"** adalah Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
10. **"POJK No. 37/2019"** adalah Peraturan OJK Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank sebagaimana dicabut sebagian melalui Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat) tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Bagi Bank Umum Konvensional.
11. **"UUPS"** adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 (dua ribu delapan) tentang Perbankan Syariah sebagaimana diubah sebagian melalui UU Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
12. **"UUPT"** adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah sebagian melalui UU Cipta Kerja.-----
13. **"UU Cipta Kerja"** adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) tentang Cipta Kerja sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) Tentang

- Cipta Kerja Menjadi Undang-undang.-----
14. **“Rancangan Pemisahan”** adalah rancangan pemisahan yang diterbitkan pada tanggal [*] sebagaimana diubah dan/atau ditambah pada tanggal [*] dan [*] yang dibuat oleh Direksi Perseroan, serta telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana disebut dalam premis huruf B Akta Pemisahan dan oleh RUPS Perseroan pada tanggal [*] sebagaimana disebut dalam premis huruf E Akta ini.-----
 15. **“Tanggal Efektif Pemisahan”** adalah tanggal efektif berlakunya Pemisahan dihitung sejak BUS melakukan kegiatan usahanya, yaitu paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sejak tanggal izin usaha dari OJK diberikan yang dibuktikan berdasarkan surat pernyataan BUS atas efektifnya Pemisahan, yang pada saat ini dijadwalkan pada tanggal [*].-----
 16. **“Unit Usaha Syariah”** atau **“UUS”** adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam UUPS.-----

Pasal 2 PEMISAHAN

Perseroan dengan ini melakukan Pemisahan UUS Perseroan dengan cara mendirikan BUS sebagai bank umum syariah hasil Pemisahan Perseroan, dan Para Calon Pendiri BUS, dengan ini menerima pengalihan Aktiva dan Pasiva UUS Perseroan yang akan dimasukkan ke dalam BUS sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang termaktub dalam Akta Pemisahan ini yang telah disusun dengan mengacu pada Rancangan Pemisahan dan dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

Pasal 3

----- **PENGALIHAN AKTIVA, PASIVA DAN AKTIVITAS USAHA** -----

Sebagai akibat dari Pemisahan yang ditetapkan dalam Pasal 2 Akta -----
Pemisahan ini, maka:-----

- 1) Pengalihan Aktivitas Usaha-----
Sejak Tanggal Efektif Pemisahan:-----
 - a. Semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas UUS Perseroan beralih karena hukum kepada dan akan diusahakan oleh BUS, atas keuntungan, kerugian, dan tanggungan BUS sebagai pihak yang menerima Pemisahan.-
 - b. Semua izin, fasilitas, lisensi, persetujuan dan pemanfaatan yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang kepada Perseroan atau UUS Perseroan dalam rangka operasi, usaha dan kegiatan serta aktivitas UUS Perseroan beralih kepada BUS, dengan ketentuan bahwa pengalihan tersebut harus berdasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku.-----

Dalam hal pengalihan atau pemindahan izin-izin, fasilitas, lisensi dan persetujuan seperti tersebut di atas memerlukan suatu tindakan lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka Perseroan dan BUS, akan mendaftarkan semua izin-izin yang dimiliki oleh Perseroan terkait dengan UUS Perseroan ke atas nama BUS-----

- a. Seluruh kantor cabang syariah, kantor cabang pembantu syariah dan layanan syariah di kantor cabang konvensional Perseroansejak Tanggal Efektif Pemisahan menjadi kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah BUS, serta layanan syariah BUS di kantor cabang Perseroan.-----
- b. Aktiva dan Pasiva UUS Perseroan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dapat beralih karena hukum kepada BUS akan tetap berada di Perseroan.-----
- c. Hak-hak, kewajiban-kewajiban dan perjanjian-perjanjian Perseroan

sehubungan dengan UUS akan beralih ke BUS berdasarkan hukum. Hal ini termasuk perjanjian-perjanjian antara Perseroan dengan nasabah UUS termasuk perjanjian-perjanjian pembukaan rekening, perjanjian-perjanjian terkait pemberian fasilitas pembiayaan dan/atau pemberian fasilitas perbankan syariah lainnya serta hak-hak jaminan yang melekat padanya (*accessoir*).-----

2) Pengalihan Aktiva-----

Sejak Tanggal Efektif Pemisahan, semua aktiva yang dimiliki oleh UUS Perseroan dengan sendirinya beralih karena hukum kepada BUS, termasuk namun tidak terbatas pada aktiva berupa apapun, baik berupa barang berwujud maupun tidak berwujud, barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan dan barang bergerak maupun tidak bergerak, serta semua hak termasuk namun tidak terbatas hak istimewa dan opsi, sebagaimana tercantum dalam neraca penutupan dari UUS Perseroan pada Tanggal Efektif Pemisahan. Daftar aktiva UUS Perseroan yang dilampirkan pada Akta Pemisahan ini adalah daftar aktiva UUS Perseroan per tanggal [*] yang memberikan gambaran terkait dengan aktiva-aktiva dari UUS Perseroan yang akan dipisahkan ke dalam BUS.-----

Dalam hal menurut ketentuan hukum yang berlaku, aktiva, hak dan tagihan Perseroan tersebut, tidak serta merta (otomatis) dan/atau tidak dengan sempurna dapat beralih atau berpindah kepada BUS, maka Perseroan dan BUS sepakat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk menyempurnakan pengalihan atau perpindahan aktiva, hak dan atau tagihan tersebut, tanpa dikecualikan termasuk namun tidak terbatas pada pembuatan dan penandatanganan perjanjian, akta dan dokumen serta surat lain yang disyaratkan.-----

3) Pengalihan Pasiva-----

Sejak Tanggal Efektif Pemisahan, semua kewajiban hukum yang menjadi tanggungan dan beban UUS Perseroan (seluruh pasiva UUS Perseroan), kepada pihak manapun, beralih karena hukum kepada BUS termasuk namun tidak terbatas pada kewajiban-kewajiban kepada pemerintah Republik Indonesia (baik pusat maupun daerah), kreditur atau lembaga pembiayaan lain, nasabah penyimpan, nasabah investor, pemegang saham, pegawai dan pihak lain yang ada pada Tanggal Efektif Pemisahan. Daftar pasiva UUS Perseroan yang dilampirkan pada Akta Pemisahan ini adalah daftar pasiva UUS Perseroan per tanggal [*] yang memberikan gambaran terkait dengan pasiva dari UUS Perseroan yang akan dipisahkan ke dalam BUS.-----

Dalam hal menurut ketentuan hukum yang berlaku, kewajiban hukum (pasiva) sebagaimana dimaksud tidak serta merta (otomatis) dan/atau tidak dengan sempurna dapat beralih atau berpindah kepada BUS, maka Perseroan dan BUS sepakat untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berdasarkan ketentuan dan hukum yang berlaku di Indonesia untuk menyempurnakan pengalihan atau perpindahan kewajiban hukum (pasiva) tersebut tanpa terkecuali namun tidak terbatas pada pembuatan dan penandatanganan perjanjian, akta dan dokumen serta surat lain yang disyaratkan.-----

4) Penyelesaian Penanganan Perkara dan Klaim-----

Sejak Tanggal Efektif Pemisahan, penanganan seluruh perkara yang timbul sebelum Tanggal Efektif Pemisahan yang terkait dengan seluruh Aktiva dan Pasiva UUS Perseroan yang dialihkan akan dilanjutkan oleh Perseroan sampai dengan diterbitkannya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.---

Biaya-biaya, ongkos-ongkos dan segala kewajiban yang timbul dalam penanganan perkara sejak Tanggal Efektif Pemisahan akan menjadi beban Perseroan, kecuali ditentukan lain oleh Perseroan dan BUS.

Sejak perkara-perkara tersebut memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dari perjanjian-perjanjian yang menjadi obyek dari perkara-perkara tersebut akan dilaksanakan oleh BUS.-----

- 5) Nasabah-----
Setelah Tanggal Efektif Pemisahan, para nasabah UUS Perseroan karena hukum akan menjadi nasabah BUS.-----

Pasal 4

PENYELESAIAN HAK DAN KEWAJIBAN PERSEROAN TERHADAP PIHAK KETIGA TERKAIT PEMISAHAN

Atas pengumuman ringkasan Rancangan Pemisahan kepada pegawai maupun pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (2) UUPT, tidak terdapat keberatan dari pihak kreditor Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direksi Perseroan yang dimaksud dalam premis huruf C akta ini.-----

Pasal 5

CARA PENYELESAIAN STATUS, HAK, DAN KEWAJIBAN DIREKTUR UUS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN PEGAWAI UUS

Penyelesaian status Direktur yang membawahi UUS, Dewan Pengawas Syariah dan pegawai akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.—

Pasal 6

TINDAKAN SEBELUM TANGGAL EFEKTIF PEMISAHAN

1. Pengumuman.-----
Direksi Perseroan telah mengumumkan ringkasan Rancangan Pemisahan berikut perubahan dan/atau tambahannya melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yaitu [*] pada tanggal [*].-----
Rencana Pemisahan juga telah diumumkan kepada seluruh karyawan – Perseroan, pada tanggal [*].-----
2. RUPS.-----
Perseroan telah melaksanakan RUPS terkait dengan Pemisahan, sebagaimana diuraikan pada Premis butir E akta ini.-----
3. Persetujuan prinsip.-----
Perseroan telah mendapatkan persetujuan prinsip berdasarkan Surat No. [*] tanggal [*] dari OJK (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan).--
4. Penandatanganan akta pemisahan dan akta pendirian BUS.-----
Pemisahan sebagaimana dimaksud dalam akta ini dilakukan dengan mendirikan BUS sebagai bank umum syariah hasil Pemisahan. Setelah ditandatanganinya akta ini, Para Calon Pendiri BUS akan menandatangani akta pendirian BUS.-----
5. Izin usaha.-----
Setelah persetujuan prinsip Pemisahan diterbitkan oleh OJK dan RUPS telah menyetujui Pemisahan, Perseroan mengajukan permohonan izin usaha BUS kepada OJK paling lambat 6 (enam) bulan sejak persetujuan prinsip diberikan. BUS yang telah memperoleh izin usaha dari OJK mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia untuk memperoleh perizinan yang diperlukan dari Bank Indonesia.-----
6. Pelaksanaan kegiatan usaha.-----
BUS hasil pemisahan harus melaksanakan kegiatan usaha paling lama 60 (enam puluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) POJK No. 12/2023. BUS hasil pemisahan wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha kepada OJK

paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan dengan melampirkan Laporan Keuangan BUS hasil pemisahan dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang. -----

Pasal 7

BERLAKUNYA PEMISAHAN

1. Pemisahan yang diuraikan dalam Akta Pemisahan ini akan berlaku pada dan terhitung sejak Tanggal Efektif Pemisahan. -----
2. Terhitung sejak Tanggal Efektif Pemisahan, hal yang ditetapkan dalam Pasal 2 dan 3 Akta Pemisahan ini akan berlaku karena hukum, tanpa perlu dilakukan tindakan apapun, baik oleh Perseroan maupun oleh BUS. -----

Pasal 8

PELAKSANAAN PEMISAHAN

Setelah Tanggal Efektif Pemisahan, Direksi BUS akan melakukan tindakan sebagai berikut: -----

- a. Membuat dan menandatangani berita acara pengalihan Aktiva dan Pasiva UUS Perseroan yang ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan BUS, termasuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk mencatatkan/mendaftarkan peralihan hak aset atas nama Perseroan menjadi atas nama BUS. -----
- b. Melakukan pemisahan operasional kantor Perseroan dengan BUS termasuk pemisahan sistem dan kebijakan operasional dengan memenuhi ketentuan perbankan;-----
Paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah Tanggal Efektif Pemisahan BUS akan melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha BUS -----
- c. Paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah Tanggal Efektif Pemisahan Perseroan akan mengajukan permohonan pencabutan izin usaha UUS kepada OJK -----
- d. Melakukan pemisahan dan penyesuaian yang diperlukan terhadap seluruh identitas, merek dagang, nama atau logo yang tercantum dalam setiap dokumen, aset, identitas dan data atau benda lainnya yang selama ini tercantum dan/atau dikenal dengan nama UUS Perseroan menjadi atas nama BUS; -----
- e. Mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat sehubungan dengan Pemisahan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Efektif Pemisahan sebagaimana diatur dalam POJK No. 37/2019 dan POJK No. 31/2015.-----

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

1. Bahasa Resmi Perjanjian
Akta Pemisahan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. -----
2. Penambahan, Pengurangan dan Pengubahan -----
Akta Pemisahan ini hanya dapat ditambah, dikurangi atau diubah secara tertulis dalam bentuk akta notaris dalam bahasa Indonesia.-----
2. Kemandirian Suatu Ketentuan-----
Jika suatu ketentuan atau syarat dalam Akta Pemisahan ini, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku atau suatu keputusan badan peradilan dinyatakan tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka bagaimanapun hal tersebut tidak akan mempengaruhi atau mengurangi berlakunya, keabsahan dan pelaksanaan ketentuan atau syarat lainnya dalam Akta Pemisahan ini, ketentuan dan syarat lainnya tersebut akan tetap berlaku secara sah dan mengikat terhadap para pihak dalam Akta -----
Pemisahan ini.-----

4. Keterlambatan Melaksanakan Hak -----
Setiap keterlambatan atau kelalaian oleh Perseroan atau dalam melaksanakan suatu atau sebagian dari hak dan wewenangnya yang -----tercantum dalam Akta Pemisahan ini, tidak dapat dianggap atau bukan merupakan suatu pengesampingan dari hak dan wewenang tersebut, atau hak dan wewenang lain yang tercantum dalam Akta Pemisahan ini. -----
5. Kuasa Untuk Memberitahukan Atau Mendaftarkan Peralihan Hak sejak Tanggal Efektif Pemisahan-----
 - a. Perseroan dengan ini memberi kuasa dan wewenang penuh kepada BUS, dengan diberi hak untuk memindahkan kuasa ini kepada pihak lain, atau untuk menunjuk substitusi/pengganti: -----
 - i. untuk melakukan dan mengerjakan tindakan atau perbuatan berupa apapun untuk memberitahukan kepada, atau -----memperoleh pengakuan dari, pihak manapun yang dapat ---ditetapkan oleh Perseroan, mengenai peralihan hak menurut hukum atas Aktiva dan Pasiva UUS Perseroan termasuk, tetapi tidak terbatas pada tagihan/piutang UUS Perseroan berdasarkan kesepakatan Pemisahan yang termaktub dalam Akta Pemisahan ini;-----
 - ii. untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan di manapun dan di hadapan siapapun, atau pejabat, badan atau instansi yang berwenang siapapun dan dimanapun, antara lain (tetapi tidak terbatas) PejabatPembuat Akta Tanah dan atau instansi atau badan pertanahan lain yang berwenang dalam membuat, menandatangani dan mengajukan/menyerahkan semua akta, perjanjian atau dokumen berupa apapun untuk dan dalam rangka mendaftarkan peralihan hak atas barang berupa apapun milik atau yang terdaftar atas nama UUS Perseroan yang termasuk dalam Aktiva dan Pasiva UUS Perseroan ke atas nama BUS;-
 - iii. melakukan dan mengerjakan semua tindakan yang wajib ---atau oleh Perseroan dipandang perlu untuk dilakukan, (a) untuk dan dalam rangka menjalankan atau melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban UUS Perseroan berupa dan dengan nama apapun yang berhak atau wajib dilakukan oleh UUS Perseroan dalam atau berdasarkan perjanjian atau peristiwa apapun, atau (b) pada umumnya untuk dan dalam rangka melaksanakan Pemisahan yang disetujui dalam Akta Pemisahan ini;-----
 - iv. untuk mengajukan semua permohonan yang diperlukan ---atau melakukan segala tindakan yang diperlukan agar BUS -dapat dengan segera dan secara substantif menjalankan dan melaksanakan semua operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas yang dijalankan BUS dalam hal pengalihan operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas UUS Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada semua izin, fasilitas, persetujuan dan pemanfaatan yang telah diberikan oleh pihak yang berwenang kepada BUS dalam rangka operasi, usaha, kegiatan dan aktivitas BUS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Akta Pemisahan ini tidak dimungkinkan untuk dialihkan kepada BUS menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. -----
 - v. Untuk urusan tersebut di atas, berhak menghadap di hadapan instansi, pejabat, badan, orang atau pihak siapapun dan manapun, membuat, menandatangani dan menyerahkan

semua akta, dokumen, formulir atau surat berupa apapun, merundingkan, membuat dan menandatangani perjanjian mengenai atau yang berhubungan dengan semua hal yang diuraikan dalam huruf a ayat ini, termasuk namun tidak terbatas pada, memberi keterangan, melakukan dan mengerjakan tindakan atau perbuatan apapun yang wajib atau dianggap perlu untuk dilakukan untuk dan dalam rangka melakukan dan mengerjakan tindakan dan perbuatan yang dikuasakan untuk dilakukan dan dikerjakan dalam huruf a ayat ini, tanpa ada yang dikecualikan.-----

- b. Sehubungan dengan pemberian kuasa yang diuraikan di atas, Perseroan dengan ini pula membebaskan BUS dari kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban sebagai kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1802 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.-
- c. Pemberian kuasa dan wewenang yang diuraikan dalam ayat ini ----- mulai berlaku terhitung sejak Tanggal Efektif Pemisahan. -----

- 6. Kuasa Tidak Dapat Dicabut Kembali -----
Semua kuasa dan wewenang yang diberikan oleh suatu pihak dalam Akta - Pemisahan ini kepada pihak yang lain, antara lain (tetapi tidak terbatas) kuasa yang diuraikan dalam ayat 5 Pasal ini, merupakan bagian terpenting dan tidak terpisah dari Akta Pemisahan ini, yang tidak akan dibuat tanpa adanya pemberian kuasa dan wewenang tersebut, dan karenanya pemberian kuasa dan wewenang tersebut tidak dapat ditarik atau dicabut kembali oleh pihak yang memberikan kuasa dan wewenang dan juga pemberian kuasa dan wewenang tersebut tidak akan menjadi berakhir atau hapus karena terjadi atau timbulnya peristiwa atau keadaan apapun dan para pihak dalam Akta Pemisahan ini, dengan ini mengecualikan keberlakuan dari Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.-----
- 7. Hukum Yang Berlaku-----
Akta Pemisahan ini tunduk kepada dan harus ditafsirkan berdasarkan - hukum Negara Republik Indonesia.-----
- 8. Domisili Hukum-----
Mengenai Akta Pemisahan ini dan segala akibatnya, masing-masing pihak dalam Akta Pemisahan ini memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
- 9. Rancangan Pemisahan-----
Terhadap setiap hal yang mengenai atau berhubungan dengan Pemisahan antara Perseroan dengan BUS yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Akta Pemisahan ini berlaku apa yang ditetapkan dalam Rancangan Pemisahan. Dalam hal demikian, Perseroan dan BUS akan menaati dan melaksanakan apa yang ditetapkan dalam Rancangan Pemisahan. -----
- 10. Biaya Dan Pajak Pemisahan-----
Semua biaya, ongkos, upah, pajak dan pungutan yang wajib dan atau perlu dibayar untuk dan dalam rangka melaksanakan Pemisahan menjadi tanggungan dan beban [*]. -----

-Akta ini diselesaikan pada pukul

-Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas. -----

DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada - bagian awal akta ini dengan mengambil tempat di

dengan dihadiri oleh:

-

-

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi. -----

-Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi, maka ditandatangani pada akta ini oleh para penghadap, saksi dan saya, Notaris sedangkan lampiran spesimen sidik ibu jari tangan kanan para penghadap yang dibubuhi setelah penandatanganan akta ini pada lembar tersendiri dilekatkan pada akta ini.

-Dilaksanakan